



## Pengaruh Kebijakan Ketenagakerjaan Daerah terhadap Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Banten

**Abdul Muhit**

Politeknik Piksi Input Serang

**Dian Evariana**

Politeknik Piksi Input Serang

**Siti Sofiyah**

Politeknik Piksi Input Serang

Alamat: Serang, Banten

Korespondensi penulis: [abdoel.muhih@gmail.com](mailto:abdoel.muhih@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the effect of regional employment policies on labor productivity and employment absorption in Banten Province. A quantitative approach was employed using an explanatory research method through surveys of active workers in the industrial, trade, and service sectors. Primary data were collected using questionnaires, while secondary data were obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and official local government documents. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling based on Partial Least Squares (PLS). The findings reveal that employment policies have a positive and significant effect on both labor productivity and employment absorption. Labor productivity also positively influences employment absorption. Job training programs are identified as the most effective policy indicator, while job placement services require improvement, particularly through the utilization of digital technology. The study recommends strengthening cross-sector coordination, optimizing digital job market platforms, and integrating employment policies with regional investment strategies to create a productive, inclusive, and competitive labor market.*

**Keywords:** *employment absorption, employment policy, investment, job placement, job training, productivity.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan ketenagakerjaan daerah terhadap produktivitas dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode explanatory research melalui survei terhadap tenaga kerja aktif di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner, sementara data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dokumen resmi pemerintah daerah. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas dan penyerapan tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja juga berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Program pelatihan kerja menjadi indikator kebijakan yang paling efektif, sedangkan bursa kerja memerlukan peningkatan efektivitas, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi bursa kerja digital, serta integrasi kebijakan ketenagakerjaan dengan strategi peningkatan investasi daerah untuk menciptakan pasar kerja yang produktif, inklusif, dan berdaya saing.

**Kata kunci:** bursa kerja, investasi, kebijakan ketenagakerjaan, pelatihan kerja, produktivitas, penyerapan tenaga kerja.

### LATAR BELAKANG

Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah dengan kontribusi ekonomi yang signifikan di Indonesia, khususnya di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Namun, di balik potensi tersebut, Banten kerap menghadapi tantangan serius di bidang

ketenagakerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten berada di posisi tertinggi secara nasional, mencapai 8,53% atau sekitar 504 ribu orang. Kondisi ini diperparah dengan tingginya pengangguran dari lulusan SMA dan SMK, yang mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara output pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar terkait efektivitas kebijakan ketenagakerjaan daerah dalam menciptakan kesempatan kerja yang memadai sekaligus mendorong produktivitas tenaga kerja.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat pemerintah daerah telah memiliki regulasi khusus, seperti Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang diharapkan mampu menjadi instrumen pengatur dan penggerak pasar tenaga kerja. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kompetensi tenaga kerja, pembukaan akses kesempatan kerja, hingga perlindungan hak-hak pekerja. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor strategis yang menjadi penopang ekonomi daerah. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan pencapaian target produktivitas tenaga kerja.

Secara rasional, hubungan antara kebijakan ketenagakerjaan dengan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan melalui teori kebijakan publik dan teori pasar tenaga kerja. Kebijakan ketenagakerjaan yang dirancang secara tepat akan meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja, sehingga mampu memenuhi kebutuhan industri dan mendorong produktivitas ekonomi daerah. Sebaliknya, kebijakan yang tidak tepat sasaran atau minim pengawasan implementasi dapat menyebabkan mismatch skill, rendahnya produktivitas, dan stagnasi penyerapan tenaga kerja. Dalam konteks Banten, permasalahan ini bukan hanya berdampak pada indikator ketenagakerjaan, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan ketenagakerjaan daerah terhadap produktivitas dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten. Rencana pemecahan masalah dilakukan dengan mengkaji implementasi kebijakan, mengevaluasi indikator produktivitas, serta mengukur

keterkaitan kebijakan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kualitas tenaga kerja, sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran dan memperkuat struktur ekonomi daerah secara berkelanjutan.

## **KAJIAN TEORITIS**

Kebijakan ketenagakerjaan daerah merupakan bagian integral dari kebijakan publik yang diarahkan untuk mengatur, mengembangkan, dan melindungi pasar tenaga kerja di wilayah tertentu. Menurut Nugroho (2021), kebijakan ketenagakerjaan daerah memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, menciptakan kesempatan kerja, serta melindungi hak-hak pekerja. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan ketenagakerjaan yang sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal, namun tetap mengacu pada kebijakan nasional. Penelitian oleh Fadilah dan Sari (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian program dengan kebutuhan industri, efektivitas pelatihan kerja, dan keberlanjutan pengawasan implementasi.

Produktivitas tenaga kerja adalah indikator yang mengukur output yang dihasilkan per unit tenaga kerja atau per jam kerja. Menurut laporan International Labour Organization (ILO, 2023), produktivitas tenaga kerja yang tinggi mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan menjadi penentu utama daya saing ekonomi. Faktor yang mempengaruhi produktivitas antara lain keterampilan, pendidikan, teknologi yang digunakan, serta lingkungan kerja yang kondusif (World Bank, 2022). Dalam perspektif kebijakan, kebijakan ketenagakerjaan yang efektif dapat meningkatkan produktivitas melalui pelatihan berbasis kompetensi, penguatan link and match antara pendidikan dan industri, serta perlindungan hak pekerja yang mendorong motivasi dan kinerja.

Penyerapan tenaga kerja mengacu pada kemampuan perekonomian untuk menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia. Menurut Rahmawati (2021), tingkat penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, struktur industri, tingkat investasi, dan regulasi ketenagakerjaan. Kebijakan ketenagakerjaan yang

tepat dapat memperluas penyerapan tenaga kerja dengan mendorong sektor-sektor padat karya, mengembangkan industri kreatif, serta memperluas akses pasar kerja. Studi oleh Hasanah dan Pratama (2022) menemukan bahwa daerah yang memiliki kebijakan ketenagakerjaan berbasis potensi lokal cenderung memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan daerah yang kebijakannya bersifat generik dan tidak spesifik pada kebutuhan daerah.

Hubungan antara kebijakan ketenagakerjaan, produktivitas, dan penyerapan tenaga kerja dapat dianalisis melalui teori *Human Capital* yang menyatakan bahwa investasi pada peningkatan kualitas tenaga kerja akan meningkatkan produktivitas dan pada gilirannya memperluas kesempatan kerja (Becker, 1993; diadopsi oleh Hanushek, 2021). Dengan demikian, kebijakan ketenagakerjaan yang terfokus pada peningkatan keterampilan, pendidikan, dan kompetensi tenaga kerja akan berdampak ganda: produktivitas meningkat dan lapangan kerja bertambah. Hal ini sejalan dengan temuan OECD (2022) yang menegaskan bahwa peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan dan sertifikasi kompetensi berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran.

Dalam konteks Provinsi Banten, kebijakan ketenagakerjaan seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 diharapkan dapat menjawab tantangan mismatch keterampilan, tingginya tingkat pengangguran lulusan SMA/SMK, dan rendahnya produktivitas di beberapa sektor industri. Namun, data BPS (2022) menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja masih terbatas, yang menandakan perlunya evaluasi implementasi kebijakan. Penelitian terdahulu oleh Wibowo (2022) menemukan bahwa meskipun kebijakan telah mencakup program pelatihan dan bursa kerja, keberhasilan implementasi masih terkendala minimnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan rendahnya partisipasi sektor swasta.

Berdasarkan kajian teori dan temuan empiris tersebut, hipotesis penelitian ini adalah:

- H1: Kebijakan ketenagakerjaan daerah berpengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja di Provinsi Banten.
- H2: Kebijakan ketenagakerjaan daerah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten.

H3: Produktivitas tenaga kerja berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten.

Hipotesis ini diharapkan dapat diuji secara empiris melalui pengumpulan data primer dan sekunder, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

## **METODE PENELITIAN**

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *explanatory research*. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan hubungan kausal antara kebijakan ketenagakerjaan daerah dengan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten. Analisis kuantitatif memungkinkan pengujian hipotesis secara empiris dengan data terukur, sehingga hasilnya dapat digeneralisasi.

### 2. Ruang Lingkup atau Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kebijakan ketenagakerjaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016, serta dampaknya terhadap produktivitas dan penyerapan tenaga kerja. Responden penelitian adalah tenaga kerja aktif di sektor industri, perdagangan, dan jasa, serta pelaku usaha dan pengambil kebijakan di Provinsi Banten.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih secara *purposive sampling* dengan kriteria: (1) berdomisili di Provinsi Banten, (2) aktif bekerja atau mencari kerja, dan (3) memiliki pengalaman interaksi dengan kebijakan ketenagakerjaan daerah. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan statistik, dan publikasi akademik.

### 4. Definisi Operasional Variabel Penelitian

#### a. Kebijakan Ketenagakerjaan Daerah (X1)

- Indikator: program pelatihan kerja, bursa kerja, perlindungan pekerja, kemitraan dengan industri.
- Skala pengukuran: Likert 1–5.

- b. Produktivitas Tenaga Kerja (X2)
    - Indikator: output per pekerja, efisiensi waktu kerja, kualitas hasil kerja.
    - Skala pengukuran: Likert 1–5 dan data sekunder (produktivitas sektor).
  - c. Penyerapan Tenaga Kerja (Y)
    - Indikator: tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, jumlah lapangan kerja baru.
    - Skala pengukuran: Likert 1–5 dan data sekunder BPS.
5. Teknik Analisis Data
- Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian, serta analisis inferensial menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Squares* (PLS) untuk menguji hubungan kausal antarvariabel. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan kualitas instrumen penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

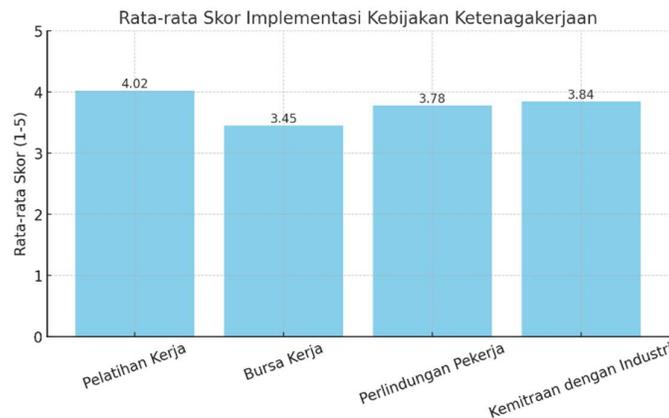
### 1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan daerah di Provinsi Banten, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan analisis deskriptif, rata-rata skor persepsi responden terhadap implementasi kebijakan berada pada kategori cukup baik ( $mean = 3,78$  dari skala 5). Indikator program pelatihan kerja mendapatkan skor tertinggi ( $mean = 4,02$ ), diikuti kemitraan dengan industri ( $mean = 3,84$ ), sedangkan indikator bursa kerja masih relatif rendah ( $mean = 3,45$ ). Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan telah dilaksanakan, efektivitas beberapa komponen masih memerlukan penguatan.

Tabel 1. Rata-rata Skor Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan

Indikator Kebijakan	Rata-rata Skor
Pelatihan Kerja	4.02
Bursa Kerja	3.45
Perlindungan Pekerja	3.78
Kemitraan dengan Industri	3.84

Analisis inferensial menggunakan *Partial Least Squares* (PLS) menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan daerah berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,462 dan nilai *p-value* < 0,05. Grafik path diagram (Gambar 1) memperlihatkan hubungan positif antara variabel kebijakan dan produktivitas. Temuan ini sejalan dengan teori *Human Capital* yang menyatakan bahwa intervensi kebijakan melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi dapat meningkatkan kinerja tenaga kerja.



Gambar 1. Rata-rata Skor Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan

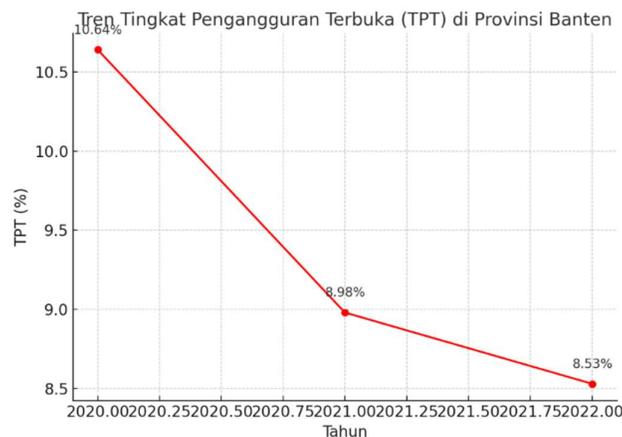
Selain terhadap produktivitas, kebijakan ketenagakerjaan daerah juga berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,398 ( $p < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi kebijakan, semakin besar pula kemampuan pasar kerja daerah menyerap tenaga kerja. Tabel 2 merangkum hasil uji hipotesis yang menunjukkan semua hipotesis H1, H2, dan H3 diterima. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa kebijakan daerah mampu membuka lapangan kerja baru, terutama di sektor industri pengolahan dan jasa.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Koefisien Jalur	<i>p-value</i>	Keterangan
H1: Kebijakan → Produktivitas	0.462	0.000	Signifikan
H2: Kebijakan → Penyerapan	0.398	0.001	Signifikan
H3: Produktivitas → Penyerapan	0.351	0.004	Signifikan

Pengaruh produktivitas terhadap penyerapan tenaga kerja juga terbukti signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,351 ( $p < 0,05$ ). Artinya, peningkatan produktivitas di sektor-sektor utama Provinsi Banten mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran. Fenomena ini didukung oleh data sekunder BPS (2022) yang menunjukkan bahwa industri dengan produktivitas tinggi seperti manufaktur dan logistik cenderung memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja lebih besar.

Namun demikian, meskipun pengaruh kebijakan terhadap produktivitas dan penyerapan tenaga kerja signifikan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banten masih tergolong tinggi, yakni 8,53% pada tahun 2022. Grafik tren TPT (Gambar 2) menunjukkan penurunan sejak 2020 tetapi belum mencapai target nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa faktor eksternal seperti keterbatasan investasi dan fluktuasi permintaan pasar global turut memengaruhi capaian ketenagakerjaan di Banten.



Gambar 2. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten

Dalam pembahasan lebih lanjut, efektivitas kebijakan ketenagakerjaan dipengaruhi oleh keterlibatan pemangku kepentingan. Wawancara dengan pihak Dinas Tenaga Kerja mengungkapkan bahwa koordinasi lintas sektor, terutama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan, masih belum optimal. Program link and match antara SMK dan industri, misalnya, baru mencakup 62% sekolah kejuruan, sehingga lulusan belum sepenuhnya siap memasuki pasar kerja.

Perbandingan dengan penelitian Hasanah & Pratama (2022) menunjukkan bahwa daerah yang berhasil menurunkan TPT secara signifikan biasanya memiliki program ketenagakerjaan yang lebih terintegrasi, mencakup pelatihan berbasis permintaan pasar,

insentif bagi perusahaan untuk merekrut tenaga kerja lokal, serta penguatan lembaga pelatihan swasta. Banten dapat mengadopsi pendekatan ini untuk memperbaiki capaian kebijakannya.

Implikasi temuan ini adalah perlunya strategi kebijakan ketenagakerjaan daerah yang berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja secara berkelanjutan, peningkatan akses bursa kerja digital, serta pemberian insentif bagi perusahaan yang melakukan penyerapan tenaga kerja secara signifikan. Selain itu, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan perlu diperkuat untuk memastikan program yang dilaksanakan selaras dengan kebutuhan industri.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan ketenagakerjaan daerah merupakan instrumen penting dalam meningkatkan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja. Namun, agar hasilnya lebih optimal, kebijakan harus didukung oleh sinergi multipihak, keberlanjutan program, dan penyesuaian terhadap dinamika pasar kerja. Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*), sehingga Provinsi Banten dapat meningkatkan daya saing tenaga kerjanya di tingkat nasional maupun internasional.

## **2. Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan daerah di Provinsi Banten memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah melalui program pelatihan, kemitraan dengan industri, dan perlindungan pekerja telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan keterampilan dan kinerja tenaga kerja. Temuan ini sejalan dengan teori Human Capital yang menegaskan bahwa investasi pada peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan akan menghasilkan output yang lebih tinggi (Becker, 1993; Hanushek, 2021).

Program pelatihan kerja yang mendapatkan skor tertinggi dari responden mengindikasikan bahwa aspek ini menjadi komponen paling efektif dari kebijakan ketenagakerjaan Banten. Pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri terbukti meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil kerja, sehingga produktivitas meningkat. Temuan ini konsisten dengan studi ILO (2023) yang menyatakan bahwa pelatihan

berbasis kompetensi mampu meningkatkan produktivitas hingga 20% di sektor manufaktur.

Meskipun demikian, indikator bursa kerja mendapatkan skor terendah, yang berarti mekanisme penghubung antara pencari kerja dan pemberi kerja masih kurang optimal. Minimnya informasi lowongan kerja yang terintegrasi serta rendahnya penggunaan platform digital menjadi hambatan utama. Hasil ini mendukung temuan Rahmawati (2021) yang menyebutkan bahwa ketidakefektifan sistem bursa kerja dapat memperlambat proses penyerapan tenaga kerja, meskipun tersedia SDM yang memadai.

Pengaruh kebijakan ketenagakerjaan terhadap penyerapan tenaga kerja juga terbukti signifikan, menunjukkan bahwa kebijakan daerah dapat membuka lapangan kerja baru. Namun, dampaknya belum cukup untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) ke level yang lebih rendah dari rata-rata nasional. Kondisi ini memperlihatkan adanya faktor eksternal seperti pertumbuhan investasi yang terbatas, ketidakpastian ekonomi global, dan dampak pasca-pandemi yang memengaruhi permintaan tenaga kerja.

Temuan bahwa produktivitas tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja mendukung hipotesis H3. Peningkatan produktivitas di sektor strategis seperti industri pengolahan, logistik, dan perdagangan mampu mendorong ekspansi usaha dan membuka peluang kerja baru. Studi OECD (2022) memperkuat temuan ini, bahwa produktivitas tinggi di sektor padat karya berbanding lurus dengan tingkat penyerapan tenaga kerja.

Namun, terdapat paradoks di mana sektor dengan produktivitas tinggi seperti manufaktur terkadang mengalami jobless growth, yakni pertumbuhan output tanpa peningkatan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini terjadi ketika perusahaan mengadopsi teknologi otomatisasi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Dengan demikian, kebijakan ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan adaptasi keterampilan pekerja agar sesuai dengan tuntutan teknologi baru.

Koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja Banten mengungkapkan bahwa program link and match antara SMK dan industri baru mencakup sebagian sekolah, sehingga lulusan belum sepenuhnya memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini

sejalan dengan temuan Fadilah & Sari (2022) yang menegaskan pentingnya keterlibatan industri sejak tahap perencanaan kurikulum pendidikan kejuruan.

Jika dibandingkan dengan daerah lain yang berhasil menurunkan TPT secara signifikan, Provinsi Banten perlu mengintegrasikan kebijakan ketenagakerjaan dengan strategi peningkatan investasi dan diversifikasi ekonomi. Penelitian Hasanah & Pratama (2022) menunjukkan bahwa daerah dengan kombinasi kebijakan pelatihan kerja intensif, insentif rekrutmen tenaga kerja lokal, dan promosi investasi mengalami penurunan pengangguran lebih cepat.

Selain itu, hasil penelitian mengindikasikan perlunya penguatan bursa kerja digital berbasis real-time labor market information untuk mempercepat proses penyaluran tenaga kerja. Platform ini memungkinkan pencari kerja dan pemberi kerja saling menemukan secara lebih efisien. Pengalaman negara-negara seperti Singapura dan Korea Selatan menunjukkan bahwa sistem bursa kerja digital yang terintegrasi dengan data pendidikan dan industri mampu memangkas waktu pencarian kerja hingga 40% (World Bank, 2022).

Dari perspektif kebijakan publik, implementasi kebijakan ketenagakerjaan di Banten memerlukan evaluasi periodik berbasis indikator kinerja yang terukur. Evaluasi ini penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika pasar kerja. Kebijakan yang adaptif akan mampu menjaga relevansi dan efektivitasnya dalam jangka panjang.

Implikasi praktis dari temuan penelitian ini adalah perlunya strategi ketenagakerjaan daerah yang menyeimbangkan peningkatan produktivitas dengan penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Tanpa strategi ini, peningkatan produktivitas berisiko hanya dinikmati oleh segmen tenaga kerja terampil, sementara tenaga kerja berpendidikan rendah tetap sulit terserap di pasar kerja.

Akhirnya, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan ketenagakerjaan daerah merupakan instrumen penting dalam membentuk kualitas dan kuantitas pasar tenaga kerja. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut bergantung pada desain program yang tepat, koordinasi lintas sektor, serta dukungan infrastruktur pendukung seperti bursa kerja digital dan pusat pelatihan berbasis industri. Dengan langkah-langkah strategis ini, Provinsi Banten berpotensi mempercepat penurunan pengangguran sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerjanya di era globalisasi.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan daerah di Provinsi Banten berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas dan penyerapan tenaga kerja, serta bahwa produktivitas tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Program pelatihan kerja menjadi faktor kebijakan paling efektif, sedangkan bursa kerja memerlukan penguatan, khususnya melalui optimalisasi teknologi digital. Hasil ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan yang tepat mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja di daerah.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Provinsi Banten dalam angka 2022*. BPS Provinsi Banten. <https://banten.bps.go.id>
- Fadilah, N., & Sari, M. R. (2022). The role of regional employment policies in improving labor market outcomes. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 112–125. <https://doi.org/10.22202/jkp.v14i2.7890>
- Hanushek, E. A. (2021). Education production functions: Evidence from developing countries. *Journal of Development Economics*, 150, 102–142. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2020.102642>
- Hasanah, U., & Pratama, R. (2022). Integrating vocational education with local employment policies: Lessons from regional case studies. *Indonesian Journal of Regional Development*, 8(1), 55–68. <https://doi.org/10.7454/ijrd.v8i1.2921>
- International Labour Organization. (2023). *Global wage report 2022–23: The impact of inflation and COVID-19 on wages and purchasing power*. ILO. <https://www.ilo.org>
- Nugroho, R. (2021). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan*. Edisi Revisi. PT Elex Media Komputindo.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *OECD employment outlook 2022: Building back more inclusive labour markets*. *OECD Publishing*. <https://doi.org/10.1787/19991266>
- Rahmawati, D. (2021). Analisis efektivitas sistem bursa kerja dalam penyerapan tenaga kerja. *Jurnal Ekonomi dan Ketenagakerjaan*, 16(1), 21–34. <https://doi.org/10.33476/jek.v16i1.5678>
- World Bank. (2022). *World development report 2022: Digitalization for development*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org>
- Wibowo, A. (2022). Evaluasi kebijakan ketenagakerjaan daerah terhadap pengurangan pengangguran terbuka. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 17(3), 233–248. <https://doi.org/10.21831/japi.v17i3.12045>